

RINGKASAN

Kemiskinan merupakan permasalahan penting yang harus diselesaikan. Pada negara berkembang seperti Indonesia masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama. Kabupaten Purbalingga juga memiliki permasalahan kemiskinan meskipun terdapat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana pembiayaan, dan dana desa terhadap kemiskinan di Purbalingga serta menganalisis efektivitas dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan terhadap penurunan kemiskinan di Purbalingga.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 2005-2022. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan *difference in differences*.

Hasil analisis menunjukkan (1) PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga. (2) DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga. (3) DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga. (4) DAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Purbalingga. (5) Dana pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Purbalingga. (6) Dummy dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Purbalingga. (7) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tidak efektif untuk menekan tingkat kemiskinan di Purbalingga.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan melakukan pembenahan pada pengeluaran sesuai dengan asas akuntabilitas, transparan, dan profesional sesuai aturan yang berlaku. Selain itu pemerintah daerah dapat meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 sehingga dapat berperan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Purbalingga. Diharapkan terdapat kolaborasi pentahelix antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat dalam bersama-sama menekan tingkat kemiskinan di Purbalingga.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Efektivitas Peraturan Daerah, *Differen in Differences*

SUMMARY

Poverty is an important problem that must be solved. In developing countries like Indonesia, poverty is still a problem that must be solved together. Purbalingga Regency also has poverty problems even though there is regional regulation number 9 of 2015 concerning the acceleration of poverty alleviation. This study aims to analyze the effect of regional original income, revenue sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, financing funds, and village funds on poverty in Purbalingga and to analyze the effectiveness of regional regulation number 9 of 2015 concerning the acceleration of poverty alleviation on poverty reduction in Purbalingga.

This study is a quantitative descriptive study. This study uses secondary data published by the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance. The data used are time series data from 2005-2022. This study uses documentation study data collection techniques. This study uses multiple regression analysis techniques and differen in differences.

The results of the analysis show (1) PAD has a negative and significant effect on poverty in Purbalingga. (2) DBH has a negative and significant effect on poverty in Purbalingga. (3) DAU has a negative and significant effect on poverty in Purbalingga. (4) DAK has no effect on poverty in Purbalingga. (5) Financing funds have a positive and significant effect on poverty in Purbalingga. (6) Dummy village funds have no effect on poverty in Purbalingga. (7) Regional regulation no. 9 of 2015 is not effective in reducing poverty levels in Purbalingga.

The Purbalingga regional government is expected to make improvements to spending in accordance with the principles of accountability, transparency, and professionalism according to applicable regulations. In addition, the regional government can review regional regulation no. 9 of 2015 so that it can play a role in reducing poverty levels in Purbalingga. It is hoped that there will be pentahelix collaboration between the Purbalingga regional government, academics, business actors, media, and the community in jointly reducing poverty levels in Purbalingga.

Keywords: Poverty, Government Spending, Effectiveness of Regional Regulations, Difference in Differences